

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial di Kota Yogyakarta kian kompleks dari waktu ke waktu. Penanganan masalah sosial itu perlu partisipasi dari semua pihak karena harus berkesinambungan. Selain anak jalanan yang makin merebah, 1.362 rumah tak layak huni. Selain itu warga yang keluar masuk Yogyakarta sangat tinggi sehingga mirip lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Hal itu dikatakan Sri Ismurdipti, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota, seperti dikutip Kedaulatan Rakyat.¹

Beliau juga mengatakan, permasalahan sosial yang menonjol di Kota Yogyakarta ada 9, yaitu keluarga miskin, anak jalanan, anak nakal, anak terlantar, keluarga tak layak huni, korban Napza, gelandangan, pengemis dan tuna susila. Keluarga miskin biasanya menjadi pangkal permasalahan sosial. Meski tidak semuanya berpangkal dari keluarga miskin, namun keluarga miskin menjadi penyebab terbesar munculnya permasalahan sosial di samping sikap mental.

Krisis moneter yang diperberat oleh bencana kekeringan yang melanda negara kita pada akhir-akhir ini telah banyak menyebabkan orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, menurunnya daya beli serta harga bahan pokok yang

¹

Yogyakarta. sehingga anak jalanan dan pengemis itupun menjadi malas untuk kembali ke daerah asalnya atau pindah ke profesi lain.⁴

Anak jalanan didukung pula dari sikap orang tua yang cenderung mendorong anaknya untuk bekerja, sehingga banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah. Anak lebih baik bekerja sehingga menghasilkan uang daripada harus pergi ke sekolah yang menghabiskan uang dan tidak menjanjikan masa depan kerja yang lebih baik. Karena hal seperti inilah yang memunculkan hubungan eksploratif antara orang tua dan anak yang dapat menyebabkan anak tidak betah di rumah dan cenderung lari ke jalanan yang dirasa bebas. Namun di jalanan, mereka mengalami kekerasan yang leboh dahsyat lagi. Mereka tak jarang terlibat dalam pencurian, perkelahian, tindak kekerasan, jual beli dan penyalahgunaan narkoba serta menukar seks demi uang dan perlindungan.

Anak-anak di masa pertumbuhan dan perkembangan cenderung mengikuti lingkungan. Secara bertahap anak-anak yang memilih ke jalanan akan mengalami perubahan perilaku yang cenderung melecehkan dan melanggar norma. Mereka mulai liar, cuek dan akhirnya membangun norma ala mereka. Hal ini terjadi pada ucapan, perilaku sampai seks bebas.

Terbentuknya komunitas-komunitas anak jalanan yang menciptakan *peer group* dimana ini berfungsi sebagai 'keluarga kedua' yang justru dimanfaatkan oleh anak-anak itu sendiri atau orang lain untuk tujuan kriminalitas dan asusila. Munculnya perluasan konflik, dimana kebebasan anak-

1. tempat-tempat ramai dan menjadi sektor informal bukan

saja belum dilindungi hukum, namun pada akhirnya menimbulkan konflik dengan berbagai pihak resmi seperti kepolisian, kamtib maupun masyarakat.

Munculnya anak yang bekerja di jalanan merupakan suatu dorongan (keterpaksaan) untuk memasuki usia produktif secara prematur. Sebagai anak yang seharusnya berhak memperoleh perlindungan, terpaksa mengalami situasi-situasi sosial-ekonomi yang terlalu dini untuk diterimanya. Keadaan itulah yang mengikatnya untuk turun ke jalanan, sehingga tidak ada lagi masa anak-anak yang indah bagi mereka. Yang ada hanyalah pikiran bagaimana untuk mempertahankan hidup ini. Namun tak jarang pula ini adalah wujud keinginan yang datang dari mereka sendiri, karena kenakalan dan sikap malas yang memang bawaan di jiwanya. Selama ini anak jalanan terkesan negatif di mata masyarakat. Orang hanya tahu bahwa mereka anak-anak jalanan dan tidak mengenalnya lebih jauh. Masalah sosial ini sudah menjadi problematik bangsa, yang kemungkinan berawal dari konflik keluarga. Adanya eksploitasi terhadap anak-anak yang menjadikan mereka sebagai sapi perahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Banyak persoalan mengenai anak jalanan mulai dari pelecehan sampai pemberian label negatif terhadap mereka, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut merupakan fenomena yang jarang tersentuh dengan 'proyek-proyek' perlindungan akan hak-haknya.

Situasi kehidupan di jalanan memang memberikan peluang bagi anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan nafkah atau

... dengan teman-teman sebayanya.

tetapi situasi kehidupan jalanan juga sangat membahayakan bagi kehidupan anak, baik ancaman kecelakaan maupun ancaman terhadap kesehatannya. Kehidupan keras di jalanan menyebabkan anak rentan terhadap eksploitasi, pemerasan, tindak kekerasan, tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta perbuatan asusila, sehingga membahayakan perkembangan emosional, intelektual dan moral anak.

Upaya perlindungan anak melibatkan seluruh segmen yang ada, baik pemerintah maupun swadaya masyarakat. Sebagaimana telah tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasikan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut pada dasarnya diarahkan untuk melindungi anak dari perlakuan salah, dieksploitasi dan penelantaran. Untuk itu Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah preventif terhadap anak jalanan yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan kebijakan untuk anak jalanan dengan berupa program-program yang efektif untuk menumbuhkembangkan daya kreatif dan daya pikir mereka yang tersalurkan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di berbagai rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial. Kegiatan ini berupa pembelajaran baca tulis, membuat keterampilan, belajar tentang sopan santun dan lain sebagainya.

Untuk kesediaan dalam melindungi, memberdayakan dan membimbing anak jalanan ini diperlukan pendekatan-pendekatan yang cukup intensif dari pihak Dinas terhadap mereka karena kegiatan dari program-program yang

... ini tidak akan memaksa mereka jika mereka tidak bersedia. Dinas

Sosial akan mengadakan identifikasi awal terhadap mereka guna pendataan perkembangan anak jalanan dan untuk pemerataan penempatan mereka di rumah-rumah singgah yang telah dikoordinasi, selanjutnya mereka dengan kesediaannya dibimbing dan dididik.

Fenomena anak jalanan semakin dirasakan sebagai salah satu permasalahan krusial dalam kehidupan kota. Anak jalanan hadir bersamaan dengan semakin merebaknya masalah kependudukan, masalah pemukiman dan masalah lain yang timbul sebagai konsekuensi perkembangan kota. Isu tentang keterlantaran anak telah lama muncul dalam dimensi kemasyarakatan, namun anak jalanan tidaklah bisa disamakan dengan anak terlantar, keduanya mempunyai pola hidup yang berbeda.⁵ Anak jalanan mengembangkan seluruh aspek kehidupannya di jalanan, kehidupan mereka menjadi sisi tersendiri dalam kehidupan kota. Dalam membicarakan anak jalanan perlu pula dilihat konsep pekerjaan anak, keduanya relatif tidak dapat dibedakan dalam batas-batas yang tegas. Namun dengan konsep anak terlantar, pekerja anak dan anak jalanan dibedakan melalui implementasi hidup yang mereka hadapi. Pekerja anak jalanan menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika. Mereka tidak saja menjadi obyek, namun mereka juga berperan sebagai subyek yang

B. Perumusan Masalah

Didasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu : mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor penghambat dan pendukung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih atau masukan bagi Dinas Sosial dalam memberdayaan anak jalanan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan

... ..

Menurut pendapat Koentjoroningrat :

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala-gejala yang diteliti dalam suatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁶

Dengan demikian teori merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti, sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program

a. Program

Menurut W. J. S. Poerwadarminta program memiliki definisi yaitu suatu rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya).⁷ Berbeda dengan Charles O. Jones dimana ia mengatakan bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.⁸ Selain itu Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto memiliki pengertian lain dari program yang cenderung menjelaskan mengenai setiap usaha mencapai tujuan.⁹

John M. Echols dan Hassan Shadily berpendapat bahwa program yaitu rencana atau rancangan mengenai apa-apa yang akan

⁶ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Jakarta, 1991, hal. 11

⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 769.

⁸ Charles O. Jones, *Kebijakan Publik*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 49

dilaksanakan.¹⁰ Perlu dipahami pula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pun memiliki definisi yang menjelaskan tentang program kurang lebihnya adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa program adalah rencana yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bersumber dari keterangan di awal tadi sudah barang tentu makna program disini yaitu program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh kantor Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan.

b. Implementasi Program

Berbicara mengenai implementasi program maka terlintas oleh kita bahwa hal tersebut merupakan sub bagian dari implementasi kebijakan. Kondisi di atas mengapa dikatakan demikian dikarenakan implementasi kebijakan publik sendiri mengandung pengertian yaitu aktivitas pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan publik (*goals of public polices*) menjadi hasil-hasil yang bisa dilihat (*out comes*).

Berdasarkan penjelasan di atas maka implementasi kebijakan merupakan fungsi dari implementasi program dan tergantung hasil-hasil (*out comes*) itu sendiri. Merilee S. Grindle merumuskan urutan itu sebagai berikut seperti disini, "*Implementation : Form policy to*

program to out comes."¹¹ Dengan adanya korelasi atau hubungan di antara implementasi program dengan implementasi kebijakan maka sudah selayaknya apabila kita memahami lebih dalam mengenai implementasi kebijakan. Pemahaman hal itu tidak hanya berpatokan dari definisi tetapi berkaitan pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bersumber dari seluruh keterangan di atas maka penjelasannya adalah sebagai berikut seperti di bawah ini.

Menurut Abdul Wahab bahwa kesadaran akan arti penting telaah yang memperbincangkan implementasi kebijakan negara baru muncul pada akhir tahun 1960-an atau tepatnya pada awal tahun 1970-an di Amerika Serikat.¹² Berbicara mengenai implementasi kebijakan William N. Dunn berkata bahwa implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian pembuatan kebijakan yang merupakan bagian dari prosedur kebijakan khususnya di bagian pemantauan atau monitoring. Proses implementasi kebijakan yang kita gunakan sangat bermanfaat dalam menilai tingkat kepatuhan, menentukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan serta rintangan implementasi dan menentukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahapan-tahapan tersebut.¹³ Berbeda dengan pendapat Santoso yang menekankan mengenai perbedaan dari pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan dimana Ia berpendapat :

¹¹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1980, hal. 6

¹² Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 122

¹³

“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya bersifat teknis administratif belaka, tetapi melibatkan juga masalah-masalah politik, dengan demikian studi implementasi kebijakan mencoba menjawab pertanyaan apa yang terjadi.”¹⁴

Abdul Wahab juga menjelaskan bahwa :

“Fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang ada dalam ilmu kebijakan negara disebut (*policy science*) disebut *policy delivery system* yaitu sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya berdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan saran-saran yang dikehendaki.”¹⁵

Dari seluruh penjelasan di atas mengenai implementasi kebijakan maka badan-badan pemerintah disinipun berperan sekali yang mana tidak hanya bertugas dan berkewajiban dalam perumusan kebijakan serta dengan segala macam keputusan kebijakan yang dihasilkan, akan tetapi instansi tersebut juga harus memiliki tugas, kewajiban serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan juga mengandung arti sebagai suatu rangkaian kegiatan setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan. Suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia tanpa adanya suatu pelaksanaan oleh karena itulah pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan. Proses pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya tidak

¹⁴ Amir Santoso, *Jurnal Ilmu Politik*, 3 Suara Pengantar, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 8

¹⁵ Amir Santoso, *Jurnal Ilmu Politik*, 3 Suara Pengantar, Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 8

selalu mencapai keberhasilan, sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan namun terkadang sering pula menimbulkan kegagalan dari segi pelaksanaan. Dari kegagalan dimana di tahap selanjutnya dicari semacam pertanyaan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan dimana tahap selanjutnya dicari semacam jalan keluar atau solusi mengenai langkah-langkah kongkrit yang bagaimana seharusnya pelaksanaan dari kebijakan itu dilaksanakan.

Dalam rangka memperjelas dari keterangan di atas, khususnya mengenai kegagalan dari pelaksanaan kebijakan, Hoorgerwerf mengutip pendapat Maarse yang mengatakan bahwa :

“Sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dikarenakan adanya hubungan dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan, tingkat informasi dan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya, banyaknya dukungan bagi pelaksanaan kebijaksanaan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi-potensi yang ada.”¹⁶

Berdasarkan dari keterangan atau pemaparan di atas mengenai faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan maka disinipun kami akan menganalisis hal-hal itu seperti di bawah ini.

Menganalisis isi kebijakan yang menyebabkan timbulnya kegagalan dari suatu kebijakan biasanya berupa samar-samar atau tidak jelasnya isi dari kebijakan dalam arti tujuan-tujuan tidak cukup terperinci. Hal ini akan berakibat kurangnya pegangan bagi para pelaksana dimana implementasi tersebut dapat menimbulkan

perbedaan pendapat yang krusial dan juga mendasar, sehingga kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara baik di lapangan.

Berhubungan dengan isi kebijakan sering mengalami kegagalan dari segi pelaksanaan dapat juga dikarenakan isi kebijakan kurang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak, dimana nantinya berhubungan dengan karakter dari rezim yang berkuasa.

Selain itu kebijak dapat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan biasanya dikarenakan adanya suatu pertentangan antara kebijakan yang satu dengan yang lain. pertentangan itu dapat ditimbulkan pula karena adanya jalinan hubungan komunikasi yang serasi antara pembuat kebijakan (*decision maker*) baik itu lembaga eksekutifnya (pemerintah) maupun badan legislatif (DPR). Selain itu faktor pendukung yang memegang peranan mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan yaitu : waktu, uang dan tenaga ahli.

Adapun kejelasan dari ketiga faktor di atas yaitu pertama mengenai segi waktu, dimana dari aspek waktu kita dapat mengukur apakah kebijakan tersebut apabila dilihat dari segi waktu pelaksanaan dapat memungkinkan terealisasi atau tidak. Uang (sumberdaya finansial) merupakan faktor pendukung yang memegang peranan yang sangat penting disebabkan seluruh kebijakan tidak dapat terlaksana bila sumber finansial tidak tersedia atau tidak tercukupi. Perlu ditekankan pula kedua aspek tersebut pun tidak akan berjalan dengan

ahli, melalui tenaga ahli mereka berusaha mendesain kebijakan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki baik itu aspek waktu maupun aspek keuangan.

Implementasi dari kebijakan publik selain itu dalam aspek tersebut ditentukan pula oleh pelaksanaan dalam birokrasi khususnya mengenai pembagian potensi-potensi diantara aktor-aktor yang bersangkutan baik itu kewenangan maupun tanggung jawab dimana yang lazim terjadi sebab tidak ada batasan-batasan yang jelas terhadap kedua hal tersebut di atas.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ternyata variabel-variabel dari implementasi kebijakan terpenuhi juga oleh karakter rezim yang berkuasa dan berhubungan dengan sistem politik yang ada. Rezim yang otoriter lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang implementasi pada kepentingan kelompok serta tanpa memperdulikan masyarakat banyak.

Latar belakang lahirnya tindakan yang dikembangkan oleh rezim tersebut biasanya untuk mendatangkan keuntungan ekonomi sehingga ada persepsi yang terjadi di masyarakat kita bahwa kalau ingin kaya maka carilah kekuasaan yang setinggi mungkin.

Jadi keberhasilan implementasi kebijakan dimana akan berhubungan dengan implementasi program guna mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan, khususnya yang berhubungan dengan

isi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana, sumberdaya (waktu, keuangan dan tenaga ahli), mekanisme birokrasi, konteks politik atau karakter rezim serta sistem politik yang ada.

Selain itu pelaksanaan dari otonomi daerah tidak hanya menerangkan prinsip-prinsip sebagaimana telah diterangkan di atas tadi namun hal ini pun memiliki segi manfaat-manfaat dimana secara teoritis, diantaranya :

- 1) Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan aktivitas masyarakat dalam pembangunan yang adil di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada.
- 2) Memperbaiki alokasi sumberdaya ekonomi yang dimiliki melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.

Segi manfaat tersebut mungkin saat ini masih belum dapat dirasakan pada tahap maksimal, mungkin disebabkan pula faktor-faktor penunjang dari program otonomi daerah terutama pelaku program tersebut sebagaimana yang menjadi cita-cita yang diharapkan dari UU Nomor 22 Tahun 1999.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah¹⁷ ketentuan

¹⁷ Undang Undang Otonomi Daerah, 1999

tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran-peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena itu UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dalam UU No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kotamadya Daerah Tingkat II. daerah kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasaan daerahu menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁸ Sedangkan otonomi yang

¹⁸ Deddy Supriady, B. PhD., Dadang Solihin, MA., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah*

nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan Kepala Daerah dalam wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.¹⁹

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Susunan pemerintah daerah otonom meliputi DPRD dan Pemda. DPRD dipisahkan dari Pemda dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemda kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

¹⁹ Ibid, hal. 25.

Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah (Lembaga Teknis Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan dan Pelatihan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain). Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi maupun dekonsentrasi, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” mengesankan arti “tangguh atau kuat”. Menurut Rappaport, praktek yang berbasiskan pemberdayaan adalah suatu bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang mengkomunikasikan yang tangguh untuk merubah hal-hal yang terkandung dalam diri seseorang, orang yang dianggap penting serta masyarakat di sekitar.²⁰

Menurut Simon, pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang dapat dimulai dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentu diri sendiri, sementara proses

lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan anak jalanan adalah kegiatan peningkatan kualitas anak jalanan melalui pendidikan, pelatihan dan belajar usaha agar mereka menjadi warga masyarakat yang produktif.

a. Tujuan pemberdayaan ini adalah :

- 1) Anak jalanan dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan latihan.
- 2) Anak jalanan menjadi warga masyarakat yang produktif baik dengan memanfaatkan peluang di jalanan maupun di luar lingkungan jalanan.
- 3) Anak jalanan dapat terhindar dari ancaman dan masalah penyalahgunaan dirinya di jalanan.

b. Jenis kegiatan

1) Pendidikan jalanan

Pendidikan jalanan adalah pendidikan yang berisikan materi tentang permasalahan di jalan dan upaya untuk menghindari dan mengatasinya. Misalnya materi tentang perilaku seks bebas, HIV/AIDS, minuman keras dan narkoba, kejahatan dan lain-lain.

2) Pelayanan pendidikan

Pemberian beasiswa, bantuan alat-alat sekolah, bimbingan belajar,

dan lain-lain.

3) Pelayanan pelatihan keterampilan kerja

Kegiatan ini berupa perbengkelan, sablon, mengemudi, elektro, menjahit, membatik, anyaman dan lainnya yang dibutuhkan anak dan sesuai dengan kondisi daerah.

4) Pelatihan-pelatihan

Kegiatan ini berupa pelatihan pendampingan anak junior, peluang usaha, manajemen usaha dan lain-lain.

5) Bantuan modal bagi anak

Bantuan modal berupa modal untuk kegiatan belajar usaha baik di daerah asal atau di jalanan, baik secara sendirian maupun berkelompok. Misalnya di pedesaan (beternak bebek/ayam), di perkotaan (kios-kios).

6) Bekerja di tempat lain

Pekerja sosial mencari hubungan dengan pihak lain dalam rangka membuka kesempatan kepada anak untuk memperoleh kerja.

c. Mekanisme pemberdayaan

Mekanisme pemberdayaan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pemberian bantuan langsung kepada anak berupa uang, misalnya untuk beasiswa dan belajar usaha.
- 2) Pemberian barang-barang danm peralatan kepada anak, misalnya anak sekolah, peralatan sablon, alat-alat tulis dan lain-lain.
- 3) Pemberian bantuan akses terhadap lembaga/perusahaan, dimana

- 4) Mendatangkan instruktur untuk mengadakan kegiatan di rumah singgah, misalnya pendidikan jalanan, pelatihan keterampilan dan pelatihan-pelatihan.
- 5) Mengirimi anak ke lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus keterampilan.
- 6) Jenis kegiatan pemberdayaan diutamakan dilaksanakan dalam kelompok.
- 7) Seorang anak hanya dapat mengikuti satu jenis kegiatan sesuai dengan potensinya kecuali kegiatan pendidikan jalanan dan pelatihan-pelatihan yang diikuti bersama.

4. Anak Jalanan

Memberdayakan anak jalanan merupakan pendekatan yang paling tepat dalam mengatasi persoalan anak jalanan karena kenyataannya menunjukkan mereka berada dalam kondisi yang tidak berdaya.

a. Akar tumbuh berkembangnya pekerja anak

Fenomena pekerja anak secara umum pada awalnya muncul dari kebiasaan atau tradisi dan budaya membantu orang tua. Tradisi seperti ini banyak diaut masyarakat Indonesia pada umumnya. Suatu kebiasaan memberikan pekerjaan kepada anak di dalam keluarga dilakukan oleh anggota keluarga untuk membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga sampai berkembang pada upaya-upaya mencari nafkah. Selain berpandangan bahwa anak mempunyai

.....

pekerjaan kepada anak-anak merupakan upaya proses belajar, yaitu belajar untuk menghargai kerja dan tanggung jawab. Selain dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja, orang tua juga berharap dapat membantu mengurangi beban kerja keluarga.²¹

Seiring dengan berkembangnya waktu, fenomena anak yang bekerja banyak berkaitan erat dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendapatan orang tua yang sangat sedikit tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa anak-anak untuk ikut bekerja. Di lain pihak biaya pendidikan Indonesia yang relatif masih tinggi ikut pula memperkecil kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan. Dalam kondisi ini, anak-anak kehilangan beberapa kesempatan yang seharusnya dialami pada masa kecilnya, seperti kesempatan bermain dan kesempatan belajar.

Transisi lanjutan terhadap munculnya pekerja anak lebih tampak pada dasawarsa terakhir, sejalan dengan kompleksitas kehidupan sebagai konsekuensi pembangunan. Pekerja anak muncul tidak terbatas pada kondisi kemiskinan ekonomi keluarga, namun telah bergeser pada sebab-sebab permintaan pasar tenaga kerja, adanya relokasi-relokasi industri dari negara lain dan kondisi *broken home* yang semakin sering dialami keluarga modern. Kondisi terakhir ini menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan krusial

²¹ Dr. Nachrowi D. Nachrowi dan Ir. Salahudin A. Muhidin, *Pekerja Anak dan Pembangunan*

sehubungan dengan terancamnya masa depan dan keberadaan anak oleh situasi-situasi pekerja anak terutama di kota-kota besar. Di desa, fenomena pekerja anak relatif tidak memunculkan permasalahan terhadap keberadaan anak, karena kondisi pekerjaan yang wajar dan dekat anak-anak dalam pemantauan keluarga.

b. Anak jalanan dan pekerja anak

Pekerja anak dan anak jalanan cenderung mempunyai karakteristik sama, yaitu biasanya berada dalam posisi terlantar. Namun keduanya dapat dibedakan jelas sehubungan dengan pola hidup dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa anak jalanan adalah pekerja anak informal, karena mereka sebenarnya bekerja di jalanan. Tetapi sisi kehidupan anak jalanan tidak cukup dilihat dari aspek kehidupan.²² Bahkan pada beberapa anak jalanan, bekerja bukan merupakan hal yang mutlak bagi mereka, persoalan sebenarnya bukan bekerja atau tidak bekerja, melainkan bagaimana harus tetap hidup. Dengan demikian anak-anak jalanan seperti ini tidak bisa dimasukkan sebagai anak-anak yang menggelandang.

Masalah pekerja anak berkuat pada persoalan-persoalan yang menyangkut faktor-faktor seperti pengusaha, pemerintah, lingkungan pekerjaan, keluarga dan anak itu sendiri. Berbeda dengan pekerja anak, anak jalanan, keluarga, bersekolah dan bermain dengan lingkungan

²² Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dari Permasalahan Sehari-hari sampai Kebijakan*, Yayasan

sebaya. Sedangkan di jalanan hidup tanpa keluarga, tidak bersekolah dan selalu bermain dengan sesama anak jalanan. Secara umum ciri-ciri anak jalanan adalah sebagai berikut :²³

- 1) Berada di tempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- 2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
- 3) Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Adanya ciri umum tersebut di atas tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena tunggal. Anak jalanan berhadapan dengan dua dimensi masalah yaitu korban dari situasi makro dan masalah keseharian mereka, tak pelak anak jalanan dan pekerja anak merupakan pejuang kehidupan, mereka berani memasuki suatu dunia yang mungkin bagi anak-anak normal tidak dapat melakukannya. Keberanian ini bukan merupakan suatu paksaan, karena tidak semua anak terlantar memilih menjadi anak jalanan atau pekerja anak.

c. Penggolongan anak jalanan

Dari pengalaman-pengalaman di lapangan dalam suatu advokasi yang dilakukan LSM diperoleh penggolongan terhadap anak jalanan yaitu :

1) *Children on the street* (anak-anak yang berada di jalanan)

Yaitu anak-anak yang berada sesaat di jalanan, di dalam kelompok ini sendiri terdapat kelompok lagi yaitu :

a) Anak-anak miskin pemukiman kumuh

Yaitu anak-anak dari dalam kota sendiri dan masih tinggal bersama orang tuanya, biasanya orang tua mereka ada yang asli penduduk kota dan para urbanisasi yang sering mendiami tempat-tempat kumuh (*slum area*) perkotaan sebagian anak-anak ini masih bersekolah dan berada di jalanan sekedar mencari tambahan bagi nafkah keluarga, beberapa anak mempunyai motivasi untuk belajar mencari uang dan menolong diri sendiri. Aspirasi mereka terhadap sekolah masih baik dibandingkan anak jalanan lainnya. Biasanya mereka masih memiliki banyak persamaan dengan anak-anak lain. Ada pula anak jalanan yang tinggal bersama orang tua, tidak lagi bersekolah, atau tidak bersekolah sama sekali, lebih lama berada di jalanan dia memiliki beban lebih berat untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya. Mereka menjadi tulang

lebih keras karena keluarganya secara ekonomis tergantung pada penghasilan mereka. Anak-anak seperti ini biasanya memiliki teman sebaya untuk berkumpul dan berbagi. Pada umumnya kelompok teman sebaya dapat menjadi pesaing orang tua dalam hal pengaruh, sehingga anak-anak ini sering konflik dengan orang tuanya. Anak-anak seperti ini sikapnya sudah banyak berbeda dengan anak-anak lain bukan anak jalanan.

b) Anak-anak yang memberontak dan lepas dari orang tua

Anak-anak kelompok ini biasanya masih memiliki orang tua, tetapi memberontak dan sepenuhnya melepaskan diri dari orang tuanya. Kebanyakan mereka yang tinggal sekota dengan orang tuanya memilih tinggal yang jauh dari orang tuanya. Pemberontakan itu ada yang dilakukan sendirian juga ada yang dilakukan bersama-sama dengan saudara yang lain. Ada yang tetap menjaga hubungan baik dengan adik atau kakaknya, tetapi ada yang sama sekali tidak menjalin hubungan dengan seluruh anggota keluarganya. Anak-anak yang memberontak ini pada umumnya anak-anak yang sangat berani mengambil resiko dan tidak terlalu tergantung pada orang lain. Setelah sampai di jalanan, biasanya mereka akan berbaur dalam

c) Anak-anak dari luar kota

Anak-anak yang tinggal bersama teman sebaya dan orang yang lebih tua, sementara orang tuanya di kampung. Kelompok-kelompok itu ada yang memiliki bos yang berkaitan dengan pekerjaan seperti loper koran, atau pengasong rokok. Ada pula yang memiliki bos berdasarkan kebersamaan tempat tinggal dan masing-masing bekerja pada bidang yang berbeda, juga ada yang terpaksa memiliki bos yang menyeter sejumlah uang untuk kelangsungan pekerjaan.

Anak-anak ini cenderung sangat tergantung dan dipengaruhi oleh kelompok mereka dalam situasi tertentu. Ikatan kelompok sangat kuat karena kesamaan daerah asal, jenis pekerjaan, maupun karena telah hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Hidup dan perilaku yang mereka jalani relatif bebas dan tidak memenuhi aturan-aturan dan norma-norma umum.

2) *Children of The Street* (Anak-anak Yang Tumbuh Dari Jalanan)

Yaitu seluruh waktunya dihabiskan di jalanan. Biasanya kelompok anak ini tinggal dan bekerja di jalanan, tidak mempunyai rumah, tinggal di emperan pertokoan, stasiun, terminal, kolong jembatan atau taman-taman kota. Mereka umumnya berasal dari keluarga yang berkonflik, misalnya ayah ibunya cerai, penyiksaan

paling ekstrim adalah anak jalanan yang tidak jelas siapa orang tuanya, dan dimana keluarganya. Sering anak-anak ini berasal dari kelahiran dengan status yang tidak jelas. Pada umur tertentu oleh orang tuanya mereka dilepas begitu saja dan sepenuhnya menjadi anak jalanan. Dibanding yang lain, anak-anak ini memang tampak lain sama sekali, tingkat kebebasan, keliaran dan pelanggaran norma paling tinggi pada kalangan ini.

d. Sebab-sebab keberadaan anak jalanan

Secara umum sebab-sebab permasalahan munculnya fenomena anak jalanan, dalam banyak literatur menyebutkan bahwa ada kesamaan faktor-faktor itu dengan yang terjadi di berbagai negara. Penggolongan yang dibuat Tata Sudrajat menyebutkan bahwa faktor-faktor itu terbagi dalam tiga tingkatan sebagai berikut :

- 1) Tingkat makro (*immediate causer*) yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak-anak dan keluarga.
- 2) Tingkat meso (*underlying causer*) yaitu faktor-faktor yang ada di tempat anak dan keluarga berada.
- 3) Tingkat makro (*basic causer*) yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan struktur makro dari masyarakat seperti ekonomi, politik dan kebudayaan.

Selain itu faktor lain yang menyebabkan adanya anak jalanan yaitu situasi sosial yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat

lingkungan pertama bagi seorang anak, sebelum perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan seorang anak keluar dari lingkungan sosial dan menjadi anak jalanan. Perubahan tersebut antara lain kesulitan ekonomi keluarga atau perceraian orang tua, biaya sekolah yang tinggi, atau penolakan warga masyarakat sekitar yang menyebabkan anak-anak menjadi korban dan tidak dapat hidup layak lagi untuk dapat tumbuh kembang secara wajar.

Faktor-faktor tersebut merupakan institusi-institusi yang dinamis dalam arti bahwa di dalamnya menyiratkan berbagai interaksi yang warnanya ditentukan oleh keterlibatan aktor-aktor yang menciptakan kondisi yang mempengaruhi kehidupan anak jalanan, sehingga kompleksitas kehidupan mereka bukan suatu yang statis melainkan cukup dinamis. Cara-cara yang mereka pergunakan untuk bertahan hidup, berkembang dari waktu ke waktu baik secara individual maupun secara kelompok sebagai suatu proses interaktif dengan perubahan lingkungan sosial ekonomi, budaya dan politik yang terjadi di daerah perkotaan.

Tetapi anak yang berlatar belakang non ekonomi dapat dikembalikan dengan cara memperbaiki kondisi, latar belakang ekonomi cukup sulit dicari dari jalanan, namun dapat diberikan

Tiga model yang banyak digunakan untuk menangani anak jalanan yaitu :

- 1) *Street Based Strategy* (strategi berbasis di jalanan) merupakan suatu program dan kebijak yang dirancang untuk menjangkau dan melayani anak di lingkungan mereka sendiri yaitu di jalanan.
- 2) *Centre Based Strategy* (strategi yang berpusat pada panti) yaitu meliputi tempat berlindung sementara, rumah singgah yang menyediakan fasilitas asrama bagi anak-anak jalanan.
- 3) *Community Based Strategy* (strategi berbasiskan masyarakat) yaitu strategi pencegahan dan pengembalian anak pada keluarga dan masyarakat.

F. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Implementasi program

Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikan program-program dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu sehingga dapat dilihat keberhasilannya.

2. Pemerintah Daerah

Adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Dinas Daerah

Adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi maupun dekonsentrasi, dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemberdayaan

Adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupan

5. Anak Jalanan

Adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya..

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Definisi operasional adalah bagaimana cara mengukur atau melihat suatu variabel, sehingga penelitian ini akan benar dan terarah dengan baik dan jelas. Adapun definisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Program Dinas Sosial

- a. Pemberian Bantuan untuk ORSOS/Yayasan/RSG
- b. Pengembangan Usaha Ekonomi

- 2) Pemberian bantuan usaha untuk orang tua anak jalanan
- 3) Pemberian bantuan usaha KUBE untuk anak jalanan
- 4) Pemberian bantuan usaha KUBE untuk orang tua anak jalanan

c. Pembinaan Generasi Muda

- 1) Pemberian bantuan beasiswa
- 2) Pendampingan anak jalanan dengan mobil sahabat anak

d. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

- 1) Sosialisasi dan pemantapan profesi pekerja sosial anak jalanan
- 2) Sosialisasi dan pemantapan petugas pendamping anak jalanan
- 3) Sosialisasi dan pemantapan petugas pendamping KUBE
- 4) Sosialisasi dan pemantapan petugas pendamping ortu anak jalanan
- 5) Sosialisasi pencegahan anak jalanan berbasis masyarakat

2. Implementasi Program

Menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan program Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi pelaksanaan program yang dilakukan Dinas dan hal inilah yang menjadi tolak ukur sistem kerja Dinas

..... dapat mempengaruhi anak

H. Metode Penelitian

Di dalam upaya untuk memecahkan masalah yang penulis kemukakan pada identifikasi masalah di muka, diperlukan metode tertentu menurut Winarno Surachmad:

“Metode adalah suatu cara yang paling utama dipergunakan untuk mencapai tujuan”.²⁴

1. Jenis Penelitian

Di dalam kerangka melaksanakan penelitian, penulis memilih atau menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Winarno Surachmad mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Merumuskan diri dari pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa aktual.
- b. Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.²⁵

Menurut Koentjaraningrat, penelitian deskriptif yaitu :

“Memilih atau menggunakan secara tepat sifat-sifat atau individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.”²⁶

2. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan penulis melihat bahwa meningkatnya komunitas anak

²⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, CV. Tarsito, Bandung, 1978, hal. 30.

²⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 45

jalan di Yogyakarta disebabkan karena sulitnya memperoleh pekerjaan dan kegiatan di jalan menandakan penghasilan yang cukup menggiurkan.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari pihak Kepala atau Staff Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Anak Jalanan, Pimpinan atau Pekerja Sosial Rumah Singgah.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari media massa, buku, undang-undang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Unit analisis

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sampel dari Dinas Sosial diambil sebanyak 4 orang pegawai yang secara langsung menangani anak jalanan.

b. Anak Jalanan

Sampel dari anjal ini diambil sebanyak 5 orang yang telah menerima bantuan.

c. Pekerja Sosial

Sampel dari pekerja sosial yang telah menangani

d. Pekerja Sosial Rumah Singgah

Sampel diambil dari 4 perwakilan pimpinan rumah singgah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Winarno Surachmad, teknik dokumentasi adalah :²⁷

Laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu. Sumber data diperoleh dengan dua macam cara, pertama sumber primer, yaitu sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama. Kedua, sumber sekunder yaitu sumber yang menggunakan atau memperoleh dari sumber lain berdasarkan laporan-laporan kegiatan pada obyek penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan mengadakan tanya jawab kepada responden yang dijadikan unit analisis.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Winarno Surachmad, penelitian yang bersifat kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-

data yang telah tersedia, data tersebut berupa dokumentasi atau hasil wawancara.

Analisa dengan metode kualitatif ini digunakan karena menyesuaikan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yang cenderung mengumpulkan data yang banyak dan juga karena metode ini menggunakan analisis yang mengajukan secara langsung hakekat dari

... .. dengan teori-teori yang